



# Kembali Terima WTP dalam LKPD Tahun Anggaran 2022

**SUNGAI RAYA** - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) Kalimantan Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Barat Wahyu Priyono kepada Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan pada Jumat (12/5) di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian, untuk

kesembilan kalinya berturut-turut Pemerintah Kabupaten Kubu Raya meraih opini WTP tersebut. "Pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2022 dan semua sudah dilalui prosesnya, dilakukan dari tahap awal dan tahap kedua ini dan hasilnya kita syukuri bahwa kita tetap mendapatkan opini WTP dari BPK," ucap Bupati Muda Mahendrawan usai menerima hasil pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2022.

Muda menerangkan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan penyusunan

dan penyajian LKPD 2022 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kepatuhan terhadap undang-undang dan aturan terkait. Terkait masalah administrasi, kata Muda, pemerintah kabupaten melihat hal-hal yang harus diperbaiki dan terus mempelajari sesuai dengan rekomendasi BPK.

"Di sini berarti kita juga tetap harus melihat bahwa ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki untuk ke depannya. Kami menyadari kalau kami harus terus belajar dan BPK telah memberikan arahan dan bimbingan serta

hal-hal yang sifatnya menavigasi dan kita syukuri dengan langkah itu dapat memberikan perbaikan-perbaikan," ungkapnya.

Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Barat Wahyu Priyono mengatakan permasalahan yang dijumpai oleh program di masing-masing kabupaten tidak material secara akuntansi dan tidak berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan. "Permasalahan itu pertama terkait dengan pengolahan pendapatan daerah yakni pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) masih belum tertib. Jika lebih tertib bisa lebih optimal pemerintah menggali potensinya karena ada wajib pajak yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) belum disesuaikan," jelasnya.

Dikesempatan yang sama, Wahyu menambahkan, ada belanja daerah yang belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang terutama belanja modal pembangunan gedung atau perbaikan jalan. "Selain itu ada juga pengelolaan aset daerah yang belum sepenuhnya tertib," tutupnya. (ash)



**PREDIKAT WTP:** Ketua DPRD Kubu Raya, Agus Sudarmansyah mendampingi Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menerima LKPD Tahun Anggaran 2022 dengan predikat WTP yang diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Barat Wahyu Priyono.